

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)



ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

FEBRI TIMORIA KUSUMA PUTRI

B.200090233

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca publikasi dengan judul :

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)

Yang ditulis oleh:

FEBRI TIMORIA KUSUMA PUTRI

B.200090233

Penandatanganan berpendapat bahwa publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2013

Pembimbing



(Drs. Suyatmin, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. H. Triyono, SE., M.Si)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)

By
Febri Timoria Kusuma Putri

ABSTRACT

Tax is the biggest state revenue. Approximately 2/3 the current state revenue comes from taxes. Dominance as a source of tax revenue is one thing that is very reasonable, especially when natural resources, especially petroleum can no longer be relied upon. But the reality in Indonesia showed the taxpayer compliance rate is still low, it is seen in non optimal tax revenue (tax gap) and the lowest tax ratio Indonesia is ASEAN region is at 11.6 for 2005 is calculated from the total tax compared to GDP. Low levels of taxpayer compliance encourages the DGT to make earnest efforts and continuous.

This study aimed to analyze the effect of knowledge of tax on tax compliance and tax officials to analyze the influence of perception on tax compliance. Testing the hypothesis in this study using a multiple linear regression analysis. individual taxpayers who have business and professional services contained in the KPP Boyolali. Sampel research that individual taxpayers who have business and professional services that there are areas Boyolali. The sample used in this study is the individual taxpayers who have business and professional services contained in the Tax Office Primary Boyolali.

Based on the survey results revealed that knowledge of tax (X_1) obtained $t_{\text{value}} = 9.222 > 1.987$; thus partially significant effect on tax compliance. Perceptions of the tax man (X_2) obtained $t_{\text{value}} = 4.743 > 1.987$; thus partially significant effect on tax compliance. Perceptions abiding taxpayers criteria (X_3) obtained $t_{\text{value}} = 2.800 > 1.9875$; thus partially significant effect on taxpayer compliance.

F-test analysis results obtained F_{value} of $130.127 > 2.68$ this means that the knowledge of the tax, the tax officer's perception, and perception of criteria abiding taxpayers jointly significant effect on taxpayer compliance listed in the KPP Boyolali. R^2 value of 0.819, this means that variations in changes in taxpayer compliance can be explained by changes in tax knowledge and perceptions influence taxpayer for 81.9%. While remaining 18.1% is explained by other factors not come observed.

Keywords: knowledge, tax perception, taxpayers

PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak bulan januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius, 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan

perundangan-undangan perpajakan dan perubahan system pemungutan pajak. Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada Pancasila (Suandy 2000, h.75). Tujuan utama reformasi pajak menurut mantan menteri keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan Nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Gradina dan Haryanto, 2006).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam membayar nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintahpun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak. penerimaan pajak periode tahun 1969-1993 sebesar 149,49 triliun, periode tahun 1994-2000 sebesar 520,65 triliun, dan pada periode tahun 2001-2003 sebesar 778,112 triliun. selain itu peningkatan kinerja perpajakan juga dapat dilihat dari hasil tahun 2003 yang mana sumber dana dari sector pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimayu, 2004).

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak yg di bandingkan dengan PDB (Napitupula 2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib tentang pajak dan

petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak belum secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa. Untuk pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpulan pajak maupun wajib pajak sebagai pembayaran pajak (Ernawati dan Wijaya, 2011).

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu memberikan sosialisasi mengenai pajak dan penerimaan pajak sehingga ke depan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan Tentang Pajak

Pengetahuan adalah penalaran yang pertamanya tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan dalam hati. Pemahaman adalah mengerti apa yang menjadi keraguan dalam hati yang selama ini menjadi pertanyaan.

Terdapat beberapa indikator dalam mengetahui dan memahami dalam peraturan perpajakan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010). Pertama, kepemilikan NPWP yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tariff pajak. Kelima, adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Keenam, bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009).

Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 2007). Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta

sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang (Sulud Kahono, 2003).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1) : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2008:2): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sama-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*, (Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina, 2011).

Fungsi Pajak

Dalam Ilyas (2007:10-11) terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. (Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina, 2011).

B. Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

Hal – hal yang menyangkut tentang efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak adalah pertama, adanya sistem pelaporan melalui e- SPT dan e- Filling. Kedua, pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak membayar. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box. Keempat, bahwa peraturan pajak terdapat dalam internet melalui website kantor pajak. Kelima, pendaftaran NPWP bisa melalui online dari website pajak.(Widayati dan Nurlis, 2010).

Untuk mengkaji persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan yang mengacu pada undang-undang pajak penghasilan yang mengacu pada undang-undang No.9 Tahun 1994 hanya mengidentifikasi (1) kewajiban wajib pajak, (2) Hak wajib pajak, dan (3) Ketentuan mengenai sanksi perpajakan, mengingat hal-hal tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. (Kartawan dan Dedi Kusmayadi, 2002).

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Jackson and Milliron (1986), secara komprehensif mengidentifikasi adanya 14 faktor kunci yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian mengenai kepatuhan pajak. Keempat belas faktor itu adalah *age, gender, education, income, occupation or status, peers' or other taxpayers' influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority (IRS), income sources, perceived fairness of the tax system, possibility of being audited* dan *tax rate*.

Dari faktor-faktor di atas, Fischer et al (1992) membaginya kedalam empat kelompok yaitu *demographic, noncompliance opportunity, attitudes and perceptions*, dan *tax system/structure*. Pembagian yang dilakukan oleh Fischer et al. (1992) dikembangkan lagi oleh Chau and Leung (2009) dengan menambahkan faktor budaya (*culture*) kedalam model Fischer et al (1992). Secara komprehensif, model Fischer et al (1992) yang telah dimodifikasi oleh Chau and Leung (2009), telah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Chau and Leung (2009) menyarankan untuk menambahkan sebuah faktor yang penting, yaitu budaya, untuk ditambahkan kedalam model perilaku kepatuhan pajak Fischer et al (1992). Faktor budaya yang ditambahkan oleh Chau and Leung (2009) didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofstede (1991), yang meneliti adanya perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China, yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakat-nya. Dimensi budaya yang dimaksud adalah

kolektivisme dan individualisme. Orang Amerika atau budaya barat, memiliki kultur kolektivitas yang rendah namun memiliki kultur individualisme yang tinggi, sehingga mereka lebih fokus terhadap kepentingan diri sendiri daripada kepentingan grup. Sebaliknya, masyarakat China atau masyarakat dengan budaya timur memiliki individualisme yang rendah dan lebih memandang kepada kolektivitas grup. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam grupnya atau lingkungan sosial disekitarnya, agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan" (Badudu dan Zain, 1994). Kepatuhan adalah motifasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (www.pajakonline.com).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% .

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009 dalam Miladia, 2010), yakni wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat gugat. (Anggun kurnia saraswati, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik survey yaitu suatu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada para pengguna jasa pajak pada KPP Boyolali.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. (Supriyati dan Hidayat, 2008)

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dipilih secara cermat agar mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang dipilih sebagai sampel. (Supriyati dan Hidayat, 2008).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda untuk menyatakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen maka digunakan analisis regresi berganda dengan rumus (Ghozali, 2009):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Pengetahuan Tentang Pajak

X₂ : Persepsi Terhadap Petugas Pajak

X₃ : Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto 2006).

Tabel 1
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Beta	t _{hitung}	p
(Constant)	-1.344		-0.731	0.467
X1	0.979	0.590	9.222	0.000
X2	0.588	0.288	4.743	0.000
X3	0.270	0.158	2.800	0.006
R ² = 0,81,9 F _{hitung} = 130,127 F _{tabel} = 2,68 t _{tabel} = 1,987				

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Boyolali diperoleh hasil bahwa untuk variabel pengetahuan tentang pajak (X₁) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,222. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (9,222 > 1,987) dengan probabilitas

0,000 < 0,05; maka H_0 ditolak berarti H_a diterima, yang berarti bahwa pengetahuan tentang pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali. Sehingga **H_1 yang menyatakan bahwa Pengetahuan tentang pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.**

Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi terhadap petugas pajak adalah 0,588 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan persepsi terhadap petugas pajak; maka kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel persepsi terhadap petugas pajak (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,743. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,743 > 1,987$) dengan probabilitas 0,000 < 0,05; maka H_0 ditolak berarti H_a diterima, yang berarti bahwa variabel persepsi terhadap petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali. **Sehingga H_2 Persepsi petugas pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.**

Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh adalah 0,327 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh; maka kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,800. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,800 > 1,987$) dengan probabilitas 0,006 < 0,05; maka H_0 ditolak berarti H_a diterima, yang berarti bahwa persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali. **Sehingga H_3 yang menyatakan bahwa Persepsi kriteria wajib pajak patuh memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Boyolali dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan tentang pajak (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} = 9,222 > 1,987$; sehingga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya.
2. Persepsi wajib pajak (X_2) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,800 > 1,987$; sehingga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya.
3. Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $130,127 > 2,68$ hal ini berarti bahwa pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Boyolali.
4. Hasil perhitungan untuk nilai R^2 sebesar 0,819. Hal ini berarti variasi perubahan pada kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh perubahan pada pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak sebesar 81,9%. Sementara sisanya sebesar 18,1% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi.

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada KPP Boyolali untuk senantiasa memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak kepada para wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Adanya peningkatan pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak ditemukan bahwa wajib pajak tidak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini

terbukti bahwa Pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Ditemukannya persepsi petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diharapkan kepada KPP Kabupaten boyolali selalu meningkatkan Koordinasi yang baik antar karyawan dengan antasan senantiasa untuk semakin menjaga perilaku petugas pajak yang baik pada KPP Kabupaten Boyolali.
3. Persepsi kriteria wajib pajak patuh dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian diharapkan kepada wajib pajak untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinannya terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini, Pris. K, 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Skripsi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Aviantara, Aris, 2011."Mengenal Sanksi Pajak. catatan perpajakan Indonesia". [http://www. Aviantara.wrdpress.com/2012/04/18](http://www.Aviantara.wrdpress.com/2012/04/18) pukul 08:55
- Banu Witono, 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 2
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta
- Ernawati Dan Wijaya.2011."Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin" *Jurnal Spred-April 2011*,Volume 1 Nomor 1.
- Hermansyah Wawan dkk. 2009. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan Palembang*
- Hidayat dan Nugroho.2010," Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, no. 2, November 2010: 82-93.
- Ghozali, Imam, 2009. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*." Semarang: BP. Undip.
- Kartawan. Kusumayadi, 2002. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment Pada BUNS dan BUMD Kantor Pekerjaan Pajak Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. No. 2. Jilid 7.
- Lebukan, Yosefa. 2011. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi Strata 1*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Supriyati dan Hidayati Nur, 2008."Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal 41- 50.

Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina, 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Bandung Cibeunying”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol III, No. 2

Tarjo dan Kusumawati Indra, 2006.”Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan”. *JAAI*, vol. 10. No. 1, Juni 2006, hal 101 – 120.

Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar, *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*

Waluyo dan Wirawan, 2000, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta

Widayati dan Nurlis, 2010. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (studi kasus KPP Pratama Gambir Tiga)”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.